



Pengentasan Kemiskinan melalui Social Preneur

Herlina Sakawati¹, Muh. Nur Yamin², Novayanti Sopia Rukmana³, Sulmiah⁴

¹²³⁴Prodi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Abstrak. Mitra Program Kemitraan (PKM) ini adalah ibu-ibu PKK. Masalahnya adalah *pertama*, motivasi yang dimiliki oleh ibu PKK yang masih sangat kurang. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi dalam kewirausahaan dan manajemen usaha; *kedua*, selain karena *mind-set* dalam pemikiran mereka bekerja adalah menjadi pekerja pada pihak lain penyedia lapangan kerja. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, demonstrasi dan tanya jawab. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan peran serta dari ibu-ibu PKK untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan dengan berperan dalam peningkatan perekonomian keluarga serta bisa memanfaatkan masyarakat sekitar sebagaimana konsep dari social preneur.

Kata kunci: *Social Preneur*, Peningkatan Perekonomian

Abstract. Partners of the Partnership Program (PKM) are PKK mothers. The problem is first, PKK's mother's motivation is still lacking. Motivation is meant as motivation in entrepreneurship and business management; second, apart from the mind-set in their thinking that they work is to become workers on the other side of the job provider. The methods used are lectures, discussions, demonstrations and questions and answers. Through this service activity, it is hoped that the participation of PKK women to be involved in poverty alleviation by playing a role in improving the family economy and being able to take advantage of the surrounding community as the concept of social preneur.

Keywords: Social Preneur, Economic Improvement

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan publik menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah. Salah satu permasalahan yang urgent sekarang ini adalah persoalan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan sebagai sebuah permasalahan yang kompleks, bukan hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi saja tetapi juga disebabkan oleh permasalahan social, budaya dan politik (Moeljarto, 1994). Dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan diperlukan adanya kesepahaman dan identifikasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai adanya keterbatasan yang dimiliki oleh setiap individu dalam pemenuhan kebutuhannya.

Upaya penanggulangan kemiskinan dalam

konsep otonomi daerah dilakukan dengan mendorong secara terus-menerus kepada semua pihak baik itu lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS 2018, Kabupaten Jeneponto menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Sebanyak 54.050 dari 363.239 penduduk, atau sekitar 14,88 persen penduduk di Jeneponto dikategorikan sebagai penduduk miskin. Bahkan, persentase penduduk miskin di Jeneponto lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, yakni sebesar 8,69 persen.

Penguatan ekonomi desa dengan memberdayakan kelompok PKK merupakan upaya pemerintah dalam pemecahan permasalahan perekonomian bagi masyarakat yang terkena dampak dari pandemic Covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat program-program pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan ekonominya. Berbagai peraturan dan undang-undang terkait tentang desa pun dikeluarkan diantaranya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah peningkatan yang luar biasa dan menimbulkan harapan baru bagi kebangkitan desa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa.

Pemberdayaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan turut memberdayakan perempuan untuk ikut terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan perempuan terdapat beberapa pilar, yang diantaranya adalah pemberdayaan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, yang memungkinkan kaum perempuan bisa ikut berkontribusi dalam peningkatan dan pemenuhan ekonomi keluarga dengan pengolahan produk berbasis lokal yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga sendiri tanpa harus membeli lagi.

Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan, akan dilakukan dengan bekerja sama dan menggunakan jejaring organisasi ibu-ibu PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga). Dimana

selain jejaring organisasi PKK terorganisir secara baik juga kegiatannya sudah melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Aktivitas kegiatan ibu-ibu PKK di kabupaten Jeneponto khususnya di kecamatan Bangkala pada umumnya lebih banyak terkonsentrasi pada tingkat desa. Jumlah kelompok PKK di Kecamatan Bangkala terdiri dari 14 kelompok.

Jumlah Rumah tangga miskin di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018, berdasarkan data dari BPS adalah 8.289 rumah tangga atau 71,60 persen dari total rumah tangga. Jumlah kemiskinan tertinggi berada di Desa Kapita yaitu sebesar 919 rumah tangga, menyusul desa Mallasoro sebesar 856 rumah tangga. penambahan angka kemiskinan salah satunya dipicu oleh meningkatnya angka kebutuhan pokok yang berbanding terbalik dengan pendapatan keluarga. Salah satu solusinya adalah dengan memberdayakan kelompok PKK. Pemberdayaan kelompok PKK ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga sehingga bisa keluar dari permasalahan kemiskinan. Namun Kegiatan ibu ibu PKK belum berjalan maksimal. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota PKK. Kebanyakan aktifitas PKK hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan bulanan seperti arisan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dimping itu juga keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengembangan program yang dimiliki oleh ibu PKK.

II. METODE YANG DIGUNAKAN

1. Pelatihan keterampilan pembuatan produk, yang meliputi : pelatihan diarahkan untuk menciptakan produk yang memiliki nilai

- jual tinggi dan sebagai produk unggulan mitra.
2. Pelatihan motivasi dan skil manajerial kewirausahaan, diarahkan untuk menumbuhkan motivasi peserta untuk berwirausaha dan kemampuan mengelola usaha, yang meliputi: a) Pelatihan motivasi, b) Pengenalan social preneur, c) Pembuatan perencanaan usaha, d) Manajemen operasi dan produksi, e) Manajemen pemasaran, dan f) Manajemen keuangan dan akuntansi sederhana.
 3. Pelatihan pemanfaatan TIK untuk pemasaran, diarahkan untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman kemudahan dalam pemasaran dengan menggunakan TIK, yang mencakup: a) Pengenalan TIK, dan jejaring media sosial internet, b) Pembuatan blog, c) Pemanfaatan TIK untuk pemasaran secara on line, d) Transaksi dalam pemasaran on line. Pendampingan kepada para peserta pelatihan, dalam rangka: a. Pemahaman dan aplikasi pengetahuan dan skil manajerial b. Analisis potensi pasar dan pembuatan perencanaan usaha dan agar aplikatif c. Merancang /membangun dan mengelola usaha bersama dalam bentuk social preneur melalui kegiatan PKK (mulai dari perencanaan, proses produksi, pemasaran, pengaturan mekanisme dan sistem pembagian keuntungan usaha.

III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan PKM Pengentasan Kemiskinan Melalui Social Preneur Bagi Kelompok PKK di

Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 wita. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan peserta di aula SDN Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, yang sekaligus sebagai tempat pelatihan. Peserta workshop sebanyak 38 orang yang terdiri dari ibu-ibu PKK Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Pada pelaksanaan di Tahap pertama: Pre-Test; Sebelum memulai pelatihan peningkatan perekonomian melalui social preneur, maka para peserta terlebih dahulu kami ajak diskusi terkait jenis usaha apa yang telah mereka laksanakan dan seberapa jauh pengetahuan peserta terkait pemanfaatan potensi lokasi dalam membangun usaha dan seberapa besar pengetahuannya tentang berwirausaha.

Selanjutnya pada Tahap kedua; para peserta yang mengikuti pelatihan. Peserta diberikan dua pokok materi tentang peningkatan perekonomian melalui social preneur, materi pertama yaitu bagaimana memulai usaha dengan memanfaatkan potensi lokal dan materi kedua tentang TIK dalam pemasaran produk. Dua materi ini diberikan secara berurutan dengan harapan bahwa setelah peserta mengetahui tentang bagaimana memulai dan mengembangkan usaha, setelah itu peserta selanjutnya diberikan materi tentang cara pemanfaatan TIK dalam pemasaran produk. Dalam pelaksanaannya peserta sangat aktif dan antusias dalam menerima materi sampai selesai.

Kemudian pada Tahap ketiga: Post-Test, hasil secara keseluruhan dari para peserta setelah

diberikan pelatihan menunjukkan bahwa peserta sudah memahami

Tentang peningkatan perekonomian masyarakat melalui social preneur. Peserta juga setelah mengikuti pelatihan telah memiliki banyak ide yang akan segera ditindaklanjuti untuk dijadikan jenis usaha baru dan bisa bermanfaat dengan masyarakat lain sebagaimana konsep dari social preneur.

Upaya peningkatan perekonomian, dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan keluarga miskin baik pada aspek ekonomi, melalui peningkatan pendapatan, maupun aspek non ekonomi. Munculnya *social entrepreneurship (social preneur)* menandai perlunya dorongan perubahan sosial dalam masyarakat untuk menghasilkan transformasi bermanfaat yang berkelanjutan. Munculnya jiwa *social preneur* di kalangan ibu-ibu yang terikat dalam organisasi PKK bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan serta bisa memasarkan produk olahan berbasis ekonomis.

Pada pelaksanaan pengabdian yang dilakukan di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dengan judul PKM Pengentasan Kemiskinan Melalui Social Preneur Bagi Kelompok PKK di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dikatakan berhasil karena telah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peningkatan perekonomian melalui social preneur. Tingginya partisipasi dan antusiasnya masyarakat selama mengikuti kegiatan tersebut, juga memberikan pengetahuan baru bagi pelaksana pengabdian mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan pengabdian di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Dari hasil diskusi dengan peserta selama kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa dari 38 Anggota PKK di Kecamatan Bangkala, hanya ada 5 peserta yang telah memulai usaha desa yang ada di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memulai usaha dan pengelolaan usaha menjadi salah satu penyebab kurangnya wirausaha yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Selain itu keterbatasan modal yang dimiliki juga menjadi salah satu penghambat.

Pengentasan kemiskinan salah satunya bisa diselesaikan dari bawah, yaitu dengan memberdayakan ibu-ibu PKK untuk memulai usaha dan mendapatkan penghasilan sendiri paling tidak mampu berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian keluarga. Konsep dari social preneur itu sendiri lebih luas cakupannya yaitu tidak hanya berdampak pada keluarga sendiri namun mampu bermanfaat dan juga memberdayakan kelompok sekitarnya.

Apabila keinginan berwirausaha ini bisa berkembang di masyarakat maka pengentasan kemiskinan bisa secara bertahap terselesaikan. Penguatan perekonomian dari bawah ini bisa ditunjang dengan adanya peran dari pemerintah misalnya dengan pembuatan regulasi pemberdayaan dengan memberikan bantuan kepada kelompok dalam pengolahan usaha. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan peran serta dari ibu-ibu PKK untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan dengan berperan dalam peningkatan perekonomian keluarga serta bisa memanfaatkan masyarakat sekitar sebagaimana konsep dari social preneur.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelatihan dari masalah yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara keseluruhan, peserta pelatihan telah mengetahui keterampilan manajerial dalam berwirausaha dan pemasaran produk.
2. Secara khusus, peserta memiliki motivasi dan semangat untuk membuat dan mengembangkan usaha-usaha kecil dan menengah.

B. Saran

Sesuai dengan hasil pelatihan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah: Perlu diadakan tindak lanjut bagi para peserta pelatihan yaitu mengajarkan teknik foto produk yang menarik untuk digunakan dalam pemasaran produk.

2961), World Bank, January 2003 di internet path <http://www.ssrn.com>

Tjokrowinoto, Moeljarto, Prof Dr. MPA. (1994), Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto (2018), Kecamatan Bangkala Dalam angka 2018.
- Deaton, Angus (2003), *Measuring poverty*, Research Program Development Studies, Princeton University.
- Esmara, Hendra (1986), *Perencanaan dan Pembangunan Indonesia*, PT, Gramedia, Jakarta
- Listyorini, Haniek (2012), *Komponen dan sampak sosial entrepreneurship dalam upaya revitalisasi budaya dan insustri batik lasem Kabupaten Rembang*, Dinamika Kepariwisata Vol. XI No. 2, Oktober 2012
- Malassis, 1(1975), *Agriculture and Development Process*, The Unisco Press
- Swinkels, Rob and Turk, Carrie (2003), *Strategic Planning for Poverty Reduction in Vietnam : Progress and challenges for meeting the localized Millennium Development Goals (MDGs)* (Policy Research Working Paper